

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astawa, I Gede Panjta, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Direktorat Kesehatan Hewan, 2018, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner*, Jakarta: Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hadisoeparto, Hartono, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Phillipus M. dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- , 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan.
- Logemann, J.H.A, *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*, *Universitaire Pers Leiden*, 1948, Terjemahan Makkutu dan Pangkerego, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Marbun, S.F. dan M. Mahfud MD, 2000, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.
- Moh, Kuswardi dan Harmaily Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI.

Sudrajat, Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika..

Stroink, F.A.M. dalam Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syahrizal, Darda, 2012, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Triatmojo, Sudibyo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Utrecht, E, dan Moh Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keempat, 1986, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 tahun 2011.

C. Jurnal

Ajib Rakhmawanto, "Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi : Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri)", *Jurnal Bina Praja* Vol. 7 No. 3 Edisi September 2015.

Oheo K. Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintahan Daerah di Bidang Pertambangan”, Jurnal Yuridika Vol. 30 No. 1 Edisi Januari 2015.

D. Lain-Lainnya

Miftah Thoha, “Konsep Perubahan UU Kepegawaian – Kantor Kota Sukabumi KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN”, Management Kepegawaian Universitas Gajah Mada, sukabumikota.kemenag.go.id file dokumen D.ppt.

Dikutip dalam website <https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

Dikutip dalam website <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi-delagasi-dan-mandat>, pada Jumat, 31 Januari 2020, pukul 21.22 WIB.

Wawancara dengan Dwi Anggun Prasetyo sebagai staff Sub Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian, tanggal 6 Maret 2020 pukul 11.13 WIB di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Purwokerto, Kabupaten Banyumas

